

**PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN
ANAK JALANAN**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Diajukan Oleh:
TIRA RANDA ANGGREZA
NPM. 2210012111121**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 33/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Tira Randa Anggreza
Nomor : 2210012111161
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penanggulangan Anak Jalanan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN

Tira Randa Anggreza¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: tirarandaangreza2004@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of street children in Padang City remains a serious problem that impacts children's rights, safety, and development. Field data shows that the number of street children fluctuates, with 18 children being disciplined in 2025 due to alleged exploitation. Although it has been regulated in the Child Protection Law and the Public Order Regulation, the practice of exploitation still occurs in public spaces. This condition demands an active role from the Satpol PP in dealing with street children and the obstacles faced. Problem formulation: (1) What is the role of the Padang City Satpol PP in dealing with street children? (2) What are the obstacles of the Padang City Satpol PP in dealing with street children. The type of empirical juridical research is that the data sources are obtained from primary data (interviews) and secondary data (document studies). The collected data are analyzed using empirical juridical methods. Research results: (1) Satpol PP plays an active role through routine patrols, discipline at vulnerable points, data collection on street children, initial guidance, summoning parents, and coordination with the Social Service for rehabilitation referrals. Efforts are made preventively and repressively to maintain public order while protecting children from exploitation. (2) The main obstacles are external, including family economic pressure, weak parental supervision, peer influence, and the community's habit of giving money on the street. The authority of the Public Order Agency (Satpol PP) is limited to initial handling, so children are at risk of returning to the streets without the support of sustainable social policies.

Keywords: : *Satpol PP, street children, prevention*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena anak jalanan di Kota Padang masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada pemenuhan hak, keselamatan, serta perkembangan anak. Anak-anak yang beraktivitas di jalanan rentan mengalami eksploitasi ekonomi, kekerasan, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan

kehidupan yang layak. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak serta ketertiban umum, praktik anak jalanan masih ditemukan di ruang publik. Fenomena anak jalanan di Kota Padang masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada pemenuhan hak, keselamatan, serta perkembangan anak. Anak-anak yang beraktivitas di jalanan

rentan mengalami eksploitasi ekonomi, kekerasan, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak serta ketertiban umum, praktik anak jalanan masih ditemukan di ruang publik. Berdasarkan kondisi tersebut, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sangat penting dalam upaya penegakan peraturan daerah serta penanggulangan anak jalanan di Kota Padang. Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban, pembinaan awal, serta koordinasi dengan instansi terkait guna menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi anak dari praktik eksploitasi di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penanggulangan Anak Jalanan.:

PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi anak jalanan?
2. Apa saja kendala-kendala Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Satpol PP Kota Padang dalam Upaya menanggulangi anak jalanan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP

Kota Padang dalam menanggulangi anak jalanan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara & studi dokumen, data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satpol PP Kota Padang dalam Menanggulangi Anak Jalanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang memiliki peran aktif dalam penanggulangan anak jalanan melalui berbagai upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin di titik-titik rawan, pendataan anak jalanan, serta pemanggilan orang tua sebagai bentuk pembinaan awal. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui kegiatan penertiban terhadap anak yang beraktivitas di ruang publik serta koordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang bersumber dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kebiasaan masyarakat yang memberikan uang kepada anak di jalanan. Selain itu,

keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam menangani akar permasalahan sosial menyebabkan penanganan anak jalanan seringkali bersifat sementara dan berpotensi berulang. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, dinas sosial, keluarga, dan masyarakat agar penanggulangan anak jalanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Kendala-kendala Satpol PP Kota Padang dalam Penanggulangan Anak Jalanan

1. Kendala Internal

a. Kendala internal dalam pelaksanaan tugas

Tidak ditemukan kendala internal yang signifikan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Padang dalam penanggulangan anak jalanan. Secara kelembagaan, Satpol PP telah menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kegiatan operasional seperti patroli, penertiban di titik-titik rawan, pendataan anak jalanan, serta pembinaan awal dapat dilaksanakan secara terkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi organisasi dan pelaksanaan tugas, Satpol PP memiliki kesiapan dalam menjalankan perannya dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Padang.

b. Keterbatasan kewenangan dalam penanganan anak jalanan

Meskipun tidak ditemukan kendala internal yang bersifat teknis maupun administratif, keterbatasan

kewenangan Satpol PP menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan anak jalanan secara berkelanjutan. Satpol PP pada dasarnya hanya memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban dan pembinaan awal terhadap anak yang beraktivitas di jalan. Penanganan lanjutan, seperti rehabilitasi sosial dan pembinaan jangka panjang, berada dalam kewenangan instansi lain seperti Dinas Sosial. Oleh karena itu, penanganan anak jalanan memerlukan koordinasi lintas sektor agar upaya penanggulangan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menyentuh akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi keberadaan anak di jalanan., sehingga penyidik harus melakukan pemeriksaan tambahan, menghadirkan ahli, melengkapi hasil autopsi, serta memperkuat alat bukti pendukung.

2. Kendala Eksternal

a. Faktor Ekonomi Keluarga

Kendala eksternal utama dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Padang berasal dari kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Tekanan ekonomi mendorong sebagian anak untuk turun ke jalan guna membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini menyebabkan anak tetap kembali beraktivitas di jalan meskipun telah dilakukan penertiban dan pembinaan oleh Satpol PP, karena

faktor ekonomi menjadi alasan utama yang melatarbelakangi keberadaan anak di jalanan.

b. Lemahnya pengawasan orang tua

Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap aktivitas anak. Dalam beberapa kasus, orang tua tidak memberikan pengawasan yang memadai sehingga anak bebas beraktivitas di ruang publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran keluarga sangat menentukan dalam mencegah anak kembali ke jalan setelah dilakukan pembinaan oleh Satpol PP.

c. Pengaruh Lingkungan dan Teman Sebaya

Pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan dengan teman sebaya juga menjadi faktor yang mendorong anak untuk tetap berada di jalanan. Anak-anak yang berada dalam lingkungan pergaulan yang sama cenderung saling mempengaruhi untuk melakukan aktivitas seperti mengamen atau meminta-minta di persimpangan jalan dan tempat keramaian lainnya.

d. Faktor Masyarakat

kebiasaan masyarakat yang memberikan uang kepada anak di jalan turut menjadi kendala dalam penanggulangan anak jalanan. Tindakan tersebut secara tidak langsung mendorong anak untuk terus melakukan aktivitas di jalan karena dianggap sebagai sumber penghasilan yang mudah. Oleh karena itu, tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang secara

langsung, upaya penanggulangan anak jalanan akan sulit dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Satpol PP Kota Padang telah berperan aktif dalam penanggulangan anak jalanan melalui berbagai upaya preventif dan represif yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan patroli rutin, penertiban di titik-titik rawan, pendataan anak jalanan, pembinaan awal, pemanggilan orang tua, serta koordinasi dengan Dinas Sosial untuk pembinaan lanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Padang tidak menghadapi kendala internal yang signifikan, namun terdapat beberapa kendala eksternal yang memengaruhi efektivitas penanggulangan anak jalanan, antara lain faktor ekonomi keluarga, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan dan teman sebaya, serta kebiasaan masyarakat yang memberikan uang kepada anak di jalan sehingga mendorong anak untuk kembali beraktivitas di ruang publik.

B. Saran

1. Satpol PP Kota Padang diharapkan terus meningkatkan pelaksanaan penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan secara konsisten serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait,

- khususnya Dinas Sosial, agar penanganan anak jalanan dapat dilakukan secara lebih efektif.
2. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan program pembinaan dan pemberdayaan bagi anak jalanan serta keluarganya untuk mengatasi faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab anak turun ke jalan.
 3. Keluarga diharapkan meningkatkan pengawasan dan perhatian terhadap anak agar tidak melakukan aktivitas di jalan serta memberikan dukungan yang baik bagi perkembangan anak
 4. Masyarakat diharapkan tidak memberikan uang kepada anak jalanan di jalan serta turut mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi keberadaan anak jalanan di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti.R, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., Selaku Pembimbing.
4. Ibu Maiyestati, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik